

SKRIPSI

kk
Per 53 / 03
Ram
P

SAIFUL ARIF RAMADHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
ATAS KENDARAAN BERMOTOR DENGAN LEASING**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
ATAS KENDARAAN BERMOTOR DENGAN LEASING**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.

NIP. 132049476

Penyusun,



Saiful Arif Ramadhan

NIM. 039914914

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

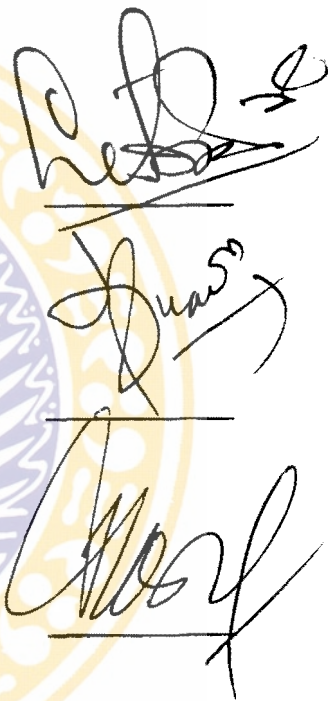
Diuji pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2003.

Panitia Penguji :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S.

Anggota : 1. Bambang Sugang Ariadi S., S.H., M.H.

2. Tri Sadini P. Usanti, S.H., M.H.



Bab IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian serta pembahasan yang telah saya kemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat saya simpulkan **hal-hal** sebagai berikut :

- a) Dalam transaksi leasing, pada dasarnya terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu lessor, lessee, dan supplier. Lessor merupakan pemilik barang leasing sebelum opsi beli dilakukan oleh lessee. Lessee adalah pihak yang membutuhkan keberadaan barang leasing tersebut, dimana ia bertindak sebagai penyewa dan baru berkedudukan sebagai pemilik setelah ia melakukan opsi beli. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek leasing. Hubungan keterikatan antara para pihak tersebut di dalam prakteknya terapat beberapa versi, namun secara umum lessor memberikan pembiayaan kepada lessee untuk mendapat barang modal yang diinginkannya, barang modal tersebut diperoleh dari supplier, dan sebagai gantinya lessee melakukan pembayaran secara berkala selama jangka waktu yang telah ditentukan kepada lessor. Hubungan keterikatan tersebut tertuang dalam perjanjian leasing, dimana perusahaan pembiayaan menggunakan perjanjian dalam bentuk baku untuk alasan kepraktisan dalam praktek.
- b) Bentuk baku pada perjanjian leasing tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dalam keadaan yang tidak seimbang dengan kedudukan perusahaan

pembiayaan, karena konsumen hanya bisa memilih opsi-opsi yang telah ditentukan dalam klausula-kalusula perjanjian baku yang ditentukan perusahaan pembiayaan terlebih dahulu. Dan untuk melindungi kedudukan konsumen tersebut telah dilakukan pembatasan-pembatasan mengenai pemberlakuan klausula baku yang termuat dalam perundang-undangan di Indonesia. Pembatsan tersebut dapat dilihat dalam Burgerlijk Wetboek (BW), Wetboek van Strafrecht (WvS), Wetboek van Koophandel (WvK), dan yang lebih khusus lagi telah diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.2. Saran

- a) Pelaku usaha hendaknya beritikad baik dalam melakukan transaksi, serta memberikan penjelasan kepada konsumen atas perjanjian yang dilakukan. Sehingga dalam menentukan klausula-klausula baku sebagai implementasi asas kebebasan berkontrak dilakukan secara bertanggungjawab. Demikian pula dengan konsumen hendaknya mulai *to protect by him self*, jangan menunggu dilindungi oleh pihak lain, bersikap dan berperilaku cermat serta hati-hati dalam bertransaksi.
- b) Pemerintah hendaknya melakukan kontrol yang intensif dan berkesinambungan atas beredarnya klausula baku yang terlarang, terutama dengan memberikan dukungan finansial kepada instansi yang terkait, diantaranya kepada LSM yang berkecimpung di bidang konsumen.

Diadakannya peraturan yang lebih lengkap dan efektif mengenai perjanjian leasing dengan membentuk suatu Undang-undang tentang leasing. Hal ini mengingat bahwa peraturan tentang leasing yang berlaku selama ini boleh dikatakan masih sangat sederhana dan kurang relevan lagi dengan perkembangan leasing sekarang. Dengan demikian maka saya sarankan sudah saatnya pihak pemerintah memikirkan pembuatan suatu Undang-undang tentang leasing, sehingga terdapat kepastian hukum bagi industri leasing. Dengan demikian diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional di masa yang akan datang.

